

Aktivisme Transnasional dalam Prakarsa *Being LGBT in Asia*: Mobilisasi Gerakan dan Pembentukan Identitas Kolektif

A. Muliastuti
Universitas Fajar

Abstrak

Diskriminasi dan persekusi terhadap kelompok LGBT di beberapa negara Asia memicu gelombang aktivisme transnasional yang juga difasilitasi oleh globalisasi dan internasionalisasi. Tidak adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak kelompok LGBT, mendorong dibentuknya Prakarsa *Being LGBT in Asia* sebagai upaya pembelajaran dan pengembangan pemahaman akan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki kelompok LGBT di Asia dengan berfokus di delapan negara prioritas yakni China, Filipina, Indonesia, Kamboja, Mongolia, Nepal, Thailand dan Vietnam. Struktur opresi di masing-masing negara didominasi oleh nilai-nilai agama, budaya (*family values*), dan konfigurasi politik domestik. Kondisi ini memunculkan ketegangan antara universalisme HAM dan relativisme budaya dalam diskursus gerakan hak-hak LGBT di Asia. Dengan menggunakan konsep aktivisme transnasional dan identitas kolektif, artikel ini berfokus pada pembentukan identitas LGBT Asia dan bagaimana identitas tersebut mempengaruhi diskursivitas gerakan hak-hak LGBT. Identitas sebagai LGBT Asia tidak hanya menjadi katalisator terbentuknya aksi kolektif komunitas LGBT, tetapi juga merupakan outcome dari proses-proses politik dalam gerakan tersebut.

Kata kunci: Aktivisme transnasional; gerakan hak-hak LGBT; identitas kolektif; diskriminasi

Discrimination and persecution against LGBT people in several Asian countries triggered a wave of transnational activism that was also facilitated by globalization and internationalization. The absence of protection of the rights of LGBT people prompted the establishment of the 'Being LGBT in Asia Initiative' as an effort to learn and develop an understanding of human rights owned by the LGBT community in Asia by focusing on eight priority countries; China, Philippines, Indonesia, Cambodia, Mongolia, Nepal, Thailand, and Vietnam. The structure of oppression in each country is dominated by religious values, traditional culture (family values), and domestic political configuration. This condition raises tensions between human rights universalism and cultural relativism in the discourse of the LGBT rights movement in Asia. Using the concept of transnational activism and collective identity, this article focuses on shaping the identity of LGBT Asia and how it affects the discursiveness of the LGBT rights movement. Identity as LGBT Asia is not only the catalyst for the formation of collective action of the LGBT community but also the outcome of the political processes.

Keywords: *Transnational activism; LGBT rights movement; collective identity; discrimination*



Pendahuluan

Prakarsa '*Being LGBT in Asia: A Participatory Review and Analysis of the Legal and Social Environment for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Persons and Civil Society*' diresmikan pada 10 Desember 2012. Inisiatif ini merupakan upaya pembelajaran yang dilakukan bersama organisasi-organisasi akar rumput dan para pimpinan komunitas LGBT di Asia, yang didukung oleh lembaga internasional khususnya United Nation Development Programme (UNDP) dan United States Agency for International Development (USAID). Dalam fokus di delapan negara prioritas, yaitu Cina, Filipina, Indonesia, Kamboja, Mongolia, Nepal, Thailand dan Vietnam, prakarsa ini menjadi arena untuk berbagai pengalaman perjuangan kelompok LGBT, mulai dari persoalan stigma, kekerasan, hingga diskriminasi. Selain itu, prakarsa *Being LGBT in Asia* bertujuan untuk mendorong kegiatan jejaring di antara kelompok LGBT di seluruh kawasan, penyusunan pengetahuan dasar dan pengembangan pemahaman akan kapasitas organisasi-organisasi LGBT untuk melibatkan diri dalam dialog kebijakan dan mobilisasi masyarakat (UNDP dan USAID 2014a).

Jika menelisik lebih jauh mengenai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak LGBT terjadi di hampir setiap negara di Asia, nilai-nilai agama dan standar moralitas yang didasarkan pada hukum tradisional keluarga serta stigma di sebagian besar masyarakat Asia. Isu LGBT telah ada sejak lama di beberapa negara Asia, seperti China, Thailand, Filipina, Kamboja, Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan beberapa negara Asia lainnya. Diskriminasi dan kriminalisasi terjadi dalam berbagai bentuk dan cara. Seperti dalam Laurent (2005) bahwa penolakan dan diskriminasi terhadap LGBT mengikuti cara yang sangat halus di negara-negara Asia. Kelompok LGBT di Asia harus menegosiasikan kebebasan, gaya hidup, dan identitas mereka dalam suasana heteroseksisme dan terkadang bukan dalam bentuk kekerasan endemik yang lazim terjadi di banyak negara.

Kondisi ini pada akhirnya membuat kelompok LGBT semakin termarginalisasi dan terisolasi secara sosial yang juga berakibat pada pengabaian hak-haknya sebagai warga negara. Ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan serta memenuhi hak-hak kelompok LGBT kemudian memunculkan gelombang protes dan aktivisme seperti yang terjadi di beberapa negara di Asia sebagai jalan alternatif dalam memperjuangkan hak-hak kelompok LGBT. Agenda perjuangan hak-hak LGBT yang termanifestasi dalam prakarsa *Being LGBT in Asia* tidak hanya membangun interkoneksi antar aktivis namun juga diperkuat dengan keterlibatan lembaga internasional seperti UNDP dan USAID.

Politisasi Asia sebagai sebuah basis identitas dalam perjuangan hak-hak LGBT memberikan potret baru terkait gerakan transnasional komunitas LGBT yang selama ini didominasi oleh aktivis dan lembaga advokasi yang ada di negara-negara maju khususnya barat. Dalam konteks ini, identitas tidak hanya berperan dalam mendorong terbentuknya gerakan hak-hak LGBT, tetapi juga menjadi bagian dari *outcome* atas gerakan hak-hak LGBT itu sendiri. Oleh karena itu, penjelasan tentang identitas dianggap sangat penting dalam proses transnasionalisasi gerakan hak-hak LGBT di Asia.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif. bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena aktivisme transnasional LGBT sebagai realitas sosial yang holistik, dinamis, penuh makna, dan hubungan antar gejala bersifat timbal balik (*reciprocal*). Besarnya pengaruh dimensi identitas dalam gerakan hak-hak LGBT menunjukkan sebuah keterkaitan yang kompleks. Identitas tidak hanya menjadi faktor pendorong dalam gerakan tersebut, namun juga sebagai *outcome* yang terus mengalami kontestasi dalam proses-proses politik. Data-data dalam penelitian ini sebagian besar merupakan data sekunder dengan memanfaatkan laporan setiap negara (*country report*), dialog dan riset tentang *Being LGBT in Asia*. Selain itu juga menggunakan media, literatur dan sumber-sumber terpercaya seperti buku, jurnal, serta artikel ilmiah. Model analisis dalam penelitian ini dilakukan secara non-linear dengan temuan penelitian yang bersifat *open-ended*. Fokus penelitian yakni memahami dan menafsirkan cara para aktor sosial dalam menciptakan dan memelihara dunia sosial. Target utama dalam analisis ini adalah menghasilkan pengetahuan sistematis atas *socially meaningful action* melalui pengamatan terhadap aktor sosial dalam gerakan aktivisme *Being LGBT in Asia*.

Konseptual Analitis

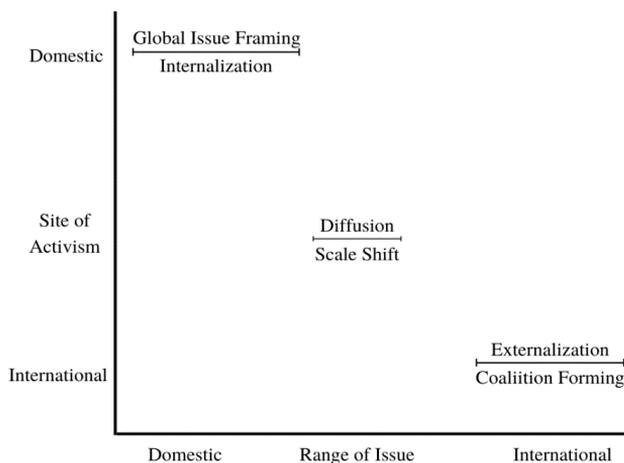
Aktivisme Transnasional: *Diffusion & Mobilization*

Konsep aktivisme transnasional merupakan konsep yang dikemukakan oleh Sidney Tarrow dalam bukunya *The New Transnational Activism* (2005). Tarrow (2005) menjelaskan bahwa untuk melihat dunia saat ini, kita tidak dapat lagi menarik batas yang tajam antara politik domestik dengan politik internasional. Menurut Tarrow (2005), aktivisme transnasional terjadi karena adanya individu-individu yang bergerak ke dalam sebuah aktivisme lintas batas yang dibatasi oleh jaringan domestik. Pada wilayah Asia, komunitas LGBT melakukan langkah ini dengan mengaktifkan proses transisi antara negara dan politik internasional. Hal

ini yang kemudian membuat komunitas LGBT saat kembali dalam realitas domestik terjadi adanya upaya pembentukan identitas baru.

Selain itu, Tarrow (2005) juga menjelaskan bahwa proses transformasi posisi dalam ide dan gerakan lintas batas berakar pada lokalitas. Sebagai agenda transformatif, Tarrow (2005) menekankan bahwa aktivisme transnasional dapat mengubah aktor menjadi pelaku gerakan transnasional. Transformasi tersebut dapat menjadi jembatan dalam gerakan sosial dari level lokal menuju global melalui *three sets of processes*. Pertama, level *domestic ground* yang terdiri dari *global framing* dan *internalization* di ranah domestik. Kedua, proses transisi dalam dua aktivitas yakni *diffusion* dan *scale shift*. Proses transisi ini dapat terjadi di ranah domestik maupun internasional dengan isu yang lebih variatif. Ketiga, level internasional yang terjadi dalam proses eksternalisasi dan koalisi transnasional. Tarrow (2005) melihat dasar kemunculan aliansi kampanye transnasional ini sebagian besar berakar pada kosmopolitanisme (*rooted cosmopolitan*). Kosmopolitan merujuk pada perasaan menjadi bagian dari dunia secara keseluruhan, tidak dibatasi pada salah satu kelompok atau bagian (Tarrow 2005).

Gambar 1. Six Processes of Transnational Contention

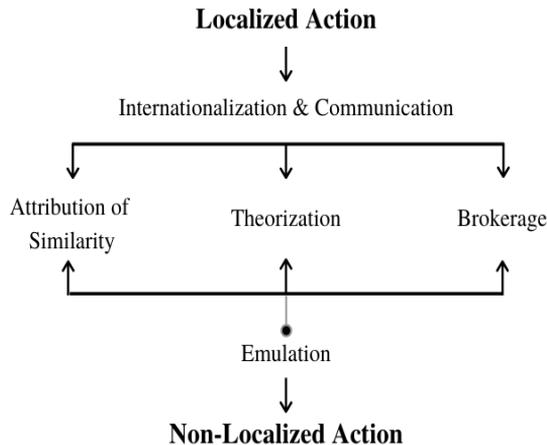


Sumber: Tarrow (2005)

Dalam tulisannya, Tarrow mencoba untuk menekankan pada tiga premis utama yaitu; (1) Aktivisme transnasional memiliki sejarah. Artinya aktivisme transnasional lebih dari sekadar refleksi melawan globalisasi, dan hal tersebut dapat terjadi karena adanya perubahan pada struktur peluang politik internasional. Dalam proses ini, globalisasi memberikan insentif dan tema-tema untuk aktivisme transnasional; (2) Internasionalisme juga

menawarkan kerangka kerja, serangkaian titik fokus, dan struktur peluang bagi para aktivis transnasional; (3) Struktur dalam politik internasional yang mengalami perubahan dapat mendorong munculnya peluang kesempatan untuk aktivisme transnasional melalui dua proses yaitu difusi dan mobilisasi (Tarrow 2005).

Gambar 2. Alternative Pathways of Transnational Diffusion



Sumber: Tarrow (2005)

Globalisasi dan internasionalisme menjadi katalisator penting dalam memfasilitasi gerakan sosial yang ada di tingkat domestik dan bertransformasi menjadi sebuah gerakan transnasional (Tarrow 2005). Dalam hal ini, globalisasi menjadi sumber minat, ideologi, dan keluhan yang kemudian menghasilkan arus dan transaksi ekonomi kapitalis internasional terjalin (Keohane 2002). Sedangkan internasionalisme adalah kerangka institusional dan informal yang menyediakan kerangka kerja bagi aktivis transnasional dalam menanggapi ancaman dan memanfaatkan peluang. Globalisasi dan internasionalisme menjadi faktor impersonal besar yang mendorong terjadinya transnasionalisasi dalam gerakan hak-hak LGBT di Asia. Perkembangan internet dan munculnya platform-platform komunikasi digital, sebagai bagian dari globalisasi, membuka peluang bagi aktivis untuk saling berinteraksi dan memperkuat komunikasi. Di sisi lain, internasionalisme mendorong keterlibatan lembaga internasional seperti UNDP dan USAID dalam gerakan hak-hak LGBT di Asia. Kemudian, globalisasi dan internasionalisme ini yang membentuk struktur peluang politik bagi aktivisme hak-hak LGBT di Asia (Tarrow 2005).

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Tarrow (1998), bahwa inti dari

Tarrow (1998), bahwa inti dari paradigma gerakan sosial adalah konsep struktur peluang politik. Konsep ini merujuk pada dimensi konsisten, tetapi tidak harus formal, permanen atau nasional dari lingkungan politik (Tarrow 1998). Seperti dirangkum oleh Tilly (1978) dan McAdam (1996), hal itu ditentukan melalui sejumlah variabel di luar sumber daya dan klaim penantang yakni; (1) Terbukanya akses kelembagaan, pergeseran dalam keberpihakan politik; (2) ada atau tidak adanya sekutu yang berpengaruh; (3) dan prospek represi atau fasilitasi. Berfokus pada proses aktivisme transnasional, Tarrow (1998) menjelaskan konteks kelembagaan dan politik pada lapisan baru aktivis transnasional yang sedang berkembang dengan menempatkan aktivis diantara akar domestik dan politik internasional. Dalam proses ini, aktivis dan komunitas LGBT tidak bermigrasi ke tingkat internasional tetapi memanfaatkan sumber daya domestik dan peluang untuk keluar-masuk dari lembaga, proses, dan aliansi internasional (Tarrow 2005).

Tarrow (2005) juga merujuk pada konsep *rooted cosmopolitan* yang didefinisikan sebagai individu dan kelompok yang memobilisasi sumber daya. Penting untuk digaris bawahi bahwa konsep ini tidak hanya mencakup aktivis dan advokat transnasional tetapi juga eksekutif bisnis, pengacara, dan pegawai sipil internasional dan pegawai negeri sipil nasional. Aktivis transnasional adalah subkelompok kosmopolit yang definisikan Tarrow (2005) sebagai orang dan kelompok yang berakar pada konteks nasional tertentu, tetapi terlibat dalam aktivitas politik yang kontroversial pada jaringan kontak dan konflik transnasional. Dalam dunia yang semakin terinternasionalisasi, lapisan aktivis dan pendukung beberapa didorong oleh tujuan yang lebih konkret dan praktis, yang lain didorong oleh komitmen ideologis (Tarrow 2005).

Identitas Kolektif (*Collective Identity*)

Identitas kolektif merupakan sebuah elemen yang memainkan peran penting dalam proses penyebaran sebuah gerakan sosial. Tidak hanya menjadi katalisator, namun juga sebagai *outcome* dari gerakan itu sendiri. Perannya yang dianggap vital dalam aksi kolektif, mendorong akademisi untuk meneliti lebih lanjut tentang dimensi identitas. Studi psikologi sosial melaporkan secara konsisten bahwa semakin banyak individu yang mengidentifikasi diri dalam suatu kelompok, maka semakin mereka cenderung untuk bergabung dengan kelompok tersebut. Untuk memahaminya, kita harus menguraikan konsep identitas. Identitas adalah pemahaman kita tentang siapa kita dan siapa orang lain, begitupun sebaliknya, pemahaman orang lain tentang diri mereka sendiri dan orang lain (Stekelenburg 2013).

Sedangkan menurut Amartya Sen (2006) cara yang berbeda dapat mengidentifikasi diri dengan pihak lain dalam hidup bermasyarakat. Berbagai macam kategori pertalian dan konteks sosial dapat mendorong seseorang untuk bergerak dan terlibat dalam sebuah kelompok atau komunitas. Jika rasa kebersamaan sebagai sebuah identitas bisa membuahkan kemajuan kelompok, dan dari sana membuahkan kemajuan pribadi, maka modus-modus perilaku yang sadar identitas itu bisa saja melipat ganda dan menyebar luas (Sen 2006). Oleh karena itu, identitas dianggap memiliki signifikansi dalam gerakan sosial khususnya dalam aktivisme yang berskala transnasional.

Dalam rangka untuk memahami LGBT, Klandermans dan de Weerd (2000) membedakan tingkat pribadi individu dan tingkat kelompok kolektif. Dalam tingkat individu, tergantung pada perbedaan identitas pribadi dan identitas sosial (Tajfel dan Turner 1979). Sedangkan dalam tingkat kelompok kolektif berasal dari kepentingan bersama, pengalaman, dan solidaritas anggota (Taylor dan Whittier 1992). Menurut Klandermans dan de Weerd (2000) identifikasi kelompok ini dapat membentuk hubungan antara identitas kolektif dan sosial, sehingga akan membentuk jembatan antara tingkat identitas individu dan kolektif (Stekelenburg 2013).

Identitas kolektif adalah sebuah pemahaman akan diri yang terkonstruksi melalui interaksi dan nilai-nilai yang dibagi bersama atau *sharing values*. Pada analisis gerakan hak-hak LGBT di Asia, identifikasi identitas kolektif merupakan hal penting untuk melihat peleburan aktor gerakan dalam perjuangan kelompok LGBT. Dalam mengidentifikasi musuh bersama, aktor berusaha menggemakan ide-ide pada level kolektif yang akhirnya bersatu, baik karena persamaan maupun perbedaan (Milani dan Laniado 2007). Munculnya aktivisme transnasional komunitas LGBT tidak terlepas dari identitas kolektif yang mencoba dibentuk. *Self defined* atau pendefinisian diri berkaitan dengan konstruksi identitas kelompok LGBT atas respon terhadap struktur yang represif sehingga memunculkan sebuah *sense of collective identity* diantara aktivis LGBT di Asia.

Identitas kolektif dapat dipelajari dengan memeriksa fenomena seperti simbol, ritual, kepercayaan kelompok, dan nilai-nilai yang dibagikan oleh anggotanya. Identifikasi individu dengan suatu kelompok dapat dipelajari dengan memeriksa keyakinan individu, sentimen, komitmen terhadap kelompok, penggunaan simbol, partisipasi dalam ritual, dan sebagainya. Konsep tentang identitas kolektif dan gerakan sosial sangat luas. Hal tersebut hanya menyentuh pada dinamika gerakan identitas dalam beroperasi. Bagian pertama berfokus pada hubungan identitas dan protes, diikuti oleh pengaruh konteks sosio-politik pada politisasi identitas. Kemudian, bagian tentang identitas masa depan akan ada lebih

banyak identitas yang berbeda dan secara tradisional lebih kuat dalam mempengaruhi perubahan sosial (Stekelenburg 2013).

Hasil dan Diskusi

Persekusi dan diskriminasi individu atau kelompok LGBT, mendorong sejumlah organisasi dan aktivis untuk membentuk aliansi dengan melibatkan berbagai lembaga nasional maupun internasional guna mengadvokasi hak-hak LGBT. Melalui prakarsa *Being LGBT in Asia*, kampanye dan advokasi transnasional terkait hak-hak LGBT dilakukan secara sistematis dan terorganisir di beberapa negara di Asia. Prakarsa *Being LGBT in Asia* merupakan upaya pembelajaran untuk mengatasi ketidaksetaraan, kekerasan, stigma dan diskriminasi yang berorientasi seksual dan identitas gender di Asia. Selain itu, laporan UNDP secara umum diharapkan dapat menghasilkan *output* sebagai berikut; (1) Meningkatkan partisipasi kelompok LGBT dalam pengembangan kebijakan termasuk akses universal terhadap kesehatan, layanan sosial, pendidikan dan pekerjaan, aturan hukum dan mekanisme akuntabilitas; (2) Menghasilkan pemahaman yang lebih baik diantara para pemangku kepentingan tentang dimensi pembangunan dan inklusi orang dengan orientasi seksual yang beragam. Prakarsa ini merupakan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, lembaga regional, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memajukan inklusi sosial bagi individu LGBT di kawasan Asia (UNDP 2020).

Inisiasi pembentukan *Being LGBT in Asia* berangkat dari kesadaran bahwa kelompok LGBT telah mengalami marginalisasi dan menghadapi berbagai bentuk stigma dan diskriminasi. Prakarsa *Being LGBT in Asia* menjadi inisiatif pertama yang mendukung kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di seluruh kawasan dan di negara-negara fokus tertentu termasuk Cina, Filipina, Thailand, Indonesia, Nepal, Mongolia, Kamboja, dan Vietnam. Prakarsa ini secara resmi diluncurkan pada tahun 2012 dan diperkirakan dilaksanakan hingga Maret 2020. Pada tahun 2014, Kedutaan Besar Swedia di Bangkok, melalui bagian Kerjasama Pembangunan Regional, bergabung dengan the *U.S. Agency for International Development* (USAID) dan the *United Nations Development Programme* (UNDP) sebagai mitra pendanaan utama untuk meningkatkan profil organisasi dan lembaga regional dalam menangani masalah hak-hak LGBT. Sementara itu, *Faith in Love Foundation* (Hong Kong) dan *The Australian Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) masing-masing menjadi mitra donor pada Juli 2017 dan Agustus 2018 (USAID 2020).

Prakarsa ini mempertemukan para pemangku kepentingan untuk

mendorong pemahaman yang lebih baik tentang marginalisasi dan eksklusi yang dihadapi oleh kelompok LGBT di kawasan Asia. Selain melibatkan mitra regional seperti Asean Sogje Caucus (ASC), Asia-Pacific Transgender Network (APTN), Asia-Pacific Forum of National Human Rights Institutions (APF), the Economist Events, dan Salzburg Global Forum, prakarsa *Being LGBT in Asia* juga bekerja bersama dengan lembaga-lembaga internasional seperti; (1) Organisasi Perburuhan Internasional (ILO); (2) Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR); (3) The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS); (4) United Nations Educational; (5) Scientific and Cultural Organization (UNESCO); (6) United Nations Population Fund (UNFPA); (7) UN Women and World Health Organization (WHO) (USAID 2020). Selain itu, *Being LGBT in Asia* juga telah mempertemukan sekitar 200 masyarakat sipil, pemerintah dan pakar hak asasi manusia serta akademisi untuk berpartisipasi dalam *Regional Dialogue on LGBTI Human Rights and Health in Asia-Pacific* pada 26 sampai 27 Februari 2015 di Pusat Konferensi PBB (UNDP 2015).

Secara umum, lembaga-lembaga internasional yang menjadi mitra kerjasama dalam prakarsa ini melihat bahwa individu LGBT di kawasan Asia berada diantara populasi yang paling terpinggirkan. Seperti dalam upaya pembangunan, pengucilan sosial, dan akses kesehatan yang buruk. Hal ini menjadi penghalang dasar untuk pembangunan inklusif dan pencapaian pembangunan berkelanjutan (UNDP & APTN 2017). Prakarsa *Being LGBT in Asia* menjadi salah satu wadah bagi lembaga-lembaga pembangunan internasional dalam mewujudkan agenda pembangunan yang tertuang dalam *the Sustainable Development Goals* (SDG's). Press rilis yang diterbitkan oleh UNDP dan USAID pada 10 Desember 2012, menjelaskan bahwa proses keterlibatan regional ini akan digunakan untuk memandu UNDP, USAID, organisasi multilateral, mitra pembangunan, dan pemerintah seluruh tingkat dalam memenuhi kebutuhan komunitas LGBT (UNDP & USAID 2012).

Laporan USAID pada Agustus 2020, prakarsa *Being LGBT in Asia* telah berhasil membangun koalisi dukungan yang menyatukan sebanyak; (1) 218 departemen pemerintah; (2) 603 organisasi masyarakat sipil; (3) 28 badan hak asasi manusia; (4) dan 168 organisasi sektor swasta di 60 negara di seluruh dunia termasuk 34 negara dan yurisdiksi di kawasan Asia. Kemitraan telah meninjau hak LGBT di Asia, mengadakan dialog tingkat negara dan menerbitkan laporan untuk delapan negara yakni; (1) Kamboja; (2) Indonesia; (3) Cina; (4) Mongolia; (5) Nepal; (6) Filipina; (7) Thailand; (8) dan Vietnam. Mobilisasi partisipasi dalam prakarsa ini memanfaatkan energi dan inovasi media sosial, dalam mengembangkan

dan membuat video advokasi yang mendokumentasikan pengalaman hidup LGBT di seluruh Asia (USAID 2020).

Transnasionalisasi Gerakan: Difusi dan Mobilisasi

Konsep aktivisme transnasional menjadi jembatan dalam menganalisis dan menjelaskan mekanisme dan proses perluasan gerakan dalam prakarsa *Being LGBT in Asia*. Tarrow (2005) menjelaskan bahwa proses transnasionalisasi terjadi melalui struktur peluang politik yang memungkinkan para aktivis ataupun Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) untuk meningkatkan skala aktivisme mereka. Perubahan struktur dalam politik internasional menyumbang dua mekanisme kemunculan aktivisme transnasional yakni melalui difusi dan mobilisasi. Kedua mekanisme ini menyebarkan ide, gagasan, serta gerakan yang melampaui batas wilayah negara dan bangsa.

Proses difusi dan mobilisasi gerakan dalam prakarsa *Being LGBT in Asia* difasilitasi oleh internet dan alat komunikasi elektronik. Tercatat pada Januari 2020, Asia menempati posisi teratas untuk pengguna jejaring sosial terbanyak secara global dengan lebih dari 2.009 miliar pengguna. Asia Timur memiliki tingkat penetrasi media sosial tertinggi yaitu 71% (Info Cubic 2020). Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan cepat yang muncul menciptakan banyak register modernitas, identitas dan komunitas di Asia. Hal ini juga dipercepat dengan pertukaran ide, komoditas, budaya, dan lalu lintas orang-orang yang berpindah tempat atau bermigrasi (Curtis 2015).

Komunikasi yang terjadi melalui platform digital ini merupakan proses impersonal besar yang melatarbelakangi difusi transnasional dalam prakarsa *Being LGBT in Asia*. Laporan dari USAID menyatakan prakarsa *Being LGBT in Asia* aktif di media sosial melalui Facebook dengan 100.000 lebih jumlah suka, Twitter 8.500 lebih jumlah suka, dan Weibo sekitar 206.270 pengikut. Internasionalisasi melalui perkembangan platform digital menciptakan saluran reguler untuk komunikasi dan kesadaran akan persamaan dan perbedaan di antara para aktivis LGBT di berbagai tempat di Asia. Kecepatan dan kemudahan transfer informasi melalui platform komunikasi berupa pesan teks dan media sosial, memudahkan para aktivis LGBT untuk berkomunikasi satu sama lain dalam jarak yang jauh (USAID 2020).

Secara historis, pertumbuhan gerakan sosial bertepatan dengan datangnya internet yang memungkinkan jenis hubungan baru antara individu dan komunitas virtual (Sageman 2004). Media sosial dan media konvensional baik cetak maupun elektronik berperan dalam proses difusi dan mobilisasi

gerakan hak-hak LGBT. Media memungkinkan kelompok LGBT dapat menyuarakan tuntutan serta membawa perubahan dalam hukum, politik dan sosial melalui partisipasi masyarakat sipil dalam prakarsa *Being LGBT in Asia*. Kelompok LGBT termotivasi dengan tujuan bersama yang ditetapkan melalui pengambilan keputusan bersama di media sosial. Oleh karena itu, situs jejaring sosial seperti facebook, Twitter dan youtube memberikan ruang kepada masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam wacana komunikasi dengan menciptakan makna yang sama yang pada akhirnya berkontribusi pada perlawanan sipil yang terorganisir (Thakur & De 2016). Sedangkan media konvensional, khususnya media internasional juga memainkan peran penting dalam proses difusi ini seperti BBC, CNN, Vice, dan Reuters.

Selain memanfaatkan internet dan platform media sosial, difusi dan mobilisasi dalam Prakarsa *Being LGBT in Asia* juga diuntungkan dengan keterlibatan lembaga internasional seperti UNDP dan USAID sebagai fasilitator dan donor dialog komunitas. Proses difusi yang terjadi dalam prakarsa *Being LGBT in Asia* termediasi oleh kehadiran pihak ketiga, yakni lembaga donor internasional. Menurut Tarrow (2005), di era migrasi besar-besaran dan transportasi yang murah dan mudah, informasi tentang aksi kolektif dapat menyebar melalui pihak ketiga, atau perantara. Lembaga-lembaga ini melihat persoalan LGBT seperti ketidakadilan gender dan masalah hak asasi manusia (HAM). Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh UNDP, dinyatakan secara tegas bahwa mengakhiri diskriminasi terhadap kelompok LGBT merupakan kunci dalam mewujudkan program SDG's. Selain itu, UNDP dalam press rilis menyatakan bahwa lembaga-lembaga pembangunan internasional bekerja sama untuk membuat HAM menjadi universal dan membuat transisi inklusif secara sosial dan ekonomi (USAID 2020). Kehadiran lembaga internasional menjadi node yang menghubungkan berbagai macam gerakan di Asia yang pada awalnya saling berhubungan dengan sejumlah kecil link yang lemah. Mediasi dari pihak ketiga membuat tautan gerakan yang lemah menjadi terjalin dan semakin kuat.

Pihak ketiga tidak boleh berpartisipasi dalam politik kontroversial, tetapi posisi kunci mereka di antara situs atau pihak yang tidak ditautkan dapat mempengaruhi konten informasi yang dikomunikasikan (Tarrow 2005). Hal ini dapat terlihat dari setiap laporan hasil dialog komunitas yang dilaksanakan di setiap negara fokus, di mana meskipun disusun oleh komunitas jejaring aktivis lokal, setiap laporan (*country report*) tersebut tetap diterbitkan dan diteliti secara teknis oleh UNDP dan USAID. Dalam laporan dialog *Being LGBT in Asia*, dinyatakan bahwa pandangan dan pendapat yang disampaikan dalam publikasi tersebut adalah sebagaimana

dikemukakan oleh para penulis sehingga belum tentu mencerminkan pandangan atau pendapat UNDP dan USAID (UNDP & USAID 2014a). Oleh karena itu, posisi UNDP dan USAID hanya menjadi fasilitator tanpa mempengaruhi pesan yang ingin disampaikan oleh komunitas LGBT di Asia.

Selain difasilitasi oleh perkembangan internet dan alat komunikasi digital serta kehadiran lembaga-lembaga internasional, difusi dan mobilisasi dalam prakarsa *Being LGBT in Asia* lahir dari adanya perasaan dan keyakinan yang sama di antara para aktivis. Seperti dalam segala bentuk tindakan kolektif, ikatan sosial dan jaringan interpersonal penting dalam penyebaran jaringan (Sageman 2004). Konsep HAM tidak hanya memberikan keyakinan universal yang sama, melainkan juga kepercayaan antar pribadi, ikatan keluarga, dan asal-usul lokal yang sama. Terjadi transfer informasi di sepanjang garis interaksi yang mapan melalui atribusi kesamaan dan jaringan kepercayaan yang dihasilkan oleh proses difusi (Lee & Strang 2003).

Pelaku-pelaku aktivisme LGBT, melihat adanya bentuk-bentuk kesamaan diantara individu dan kelompok LGBT di Asia. Struktur yang secara umum dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah, budaya, dan agama, tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa mereka berada dalam satu klaster geografis yang sama, yakni Asia. Adanya pengalaman hidup dan identitas sebagai LGBT Asia dibagi bersama membentuk ikatan yang kuat diantara aktivis dan kelompok dalam prakarsa ini.

Gambar 3. Proses Difusi dan Mobilisasi dalam Prakarsa *Being LGBT in Asia*



Sumber: Usaid (2020)

Sebagai gerakan sosial, prakarsa *Being LGBT in Asia* muncul dari kesadaran aktivis dan komunitas LGBT bahwa mereka menghadapi masalah dan tantangan yang sama. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa mereka mengembangkan strategi perlawanan yang sama. Dalam proses ini, diskursus Hak Asasi Manusia (HAM) memainkan peran vital khususnya dalam apa yang disebut Tarrow (2005) sebagai *global framing* yaitu penggunaan simbol eksternal untuk orientasi lokal atau klaim nasional. Upaya ini bertujuan untuk membentuk pemahaman bersama yang didasarkan pada klaim bahwa hak-hak LGBT merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap manusia tanpa melihat identitas gender maupun orientasi seksualnya. Dengan adanya *shared-value*, *common discourse*, dan *shared-idea* yang dibangun dalam masyarakat di negara-negara kawasan, dapat membuka peluang untuk memperluas jaringan, menarik simpati dan dukungan, serta untuk mendapat atensi dari media yang merupakan bagian dari *common resistance strategies*. Proses difusi dan mobilisasi dalam prakarsa *Being LGBT in Asia* yang berlangsung melalui jalur-jalur (*pathways*) yang dijelaskan di atas berkontribusi pada pembentukan identitas yang kemudian menghasilkan efek *spillover* dari satu gerakan ke gerakan lainnya. Pada tahap ini, gerakan hak-hak LGBT yang awalnya terkonsentrasi di wilayah domestik akhirnya menyebar di berbagai tempat di Asia.

Prakarsa Being LGBT in Asia: Konstruksi Identitas Kolektif

Gerakan hak-hak LGBT di Asia menyebar dari tingkat domestik ke tingkat kawasan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Identitas memainkan peran penting dalam membentuk dan mempertahankan aksi kolektif lintas batas diantara orang-orang yang jarang bertemu satu sama lain dan berasal dari latar belakang budaya berbeda (Tarrow 2005). Dalam menguraikan formasi identitas kolektif dalam prakarsa *Being LGBT in Asia*, analisis ini akan dibagi ke dalam tiga fragmentasi identitas yakni; (1) Identitas sebagai LGBT; (2) Identitas kosmopolitan sebagai bagian dari kewarganegaraan dunia; (3) Identitas sebagai LGBT Asia.

Identitas kolektif merupakan persepsi atau perasaan (*sense*) seseorang tentang hubungan kebersamaan dalam sebuah kelompok yang menentukan nilai-nilai yang ia yakini serta bagaimana ia mendefinisikan dirinya. Identitas kolektif suatu kelompok dapat dipelajari dengan memeriksa fenomena seperti simbol, ritual, kepercayaan kelompok, dan nilai-nilai yang dibagikan oleh anggotanya. Hal ini berhubungan dengan identitas dan protes, diikuti oleh pengaruh konteks sosio-politik pada politisasi identitas (Stekelenburg 2013). Identitas kolektif sangatlah kontekstual, kompleks, majemuk, interseksional, dan saling tumpang tindih. *Sense of collective identity* seseorang bergantung pada keadaan-keadaan di dalam

keadaan di dalam komunitas di mana ia berada (Taylor & Whittier 1992).

Sampai saat ini, individu LGBT masih terpinggirkan dan menghadapi diskriminasi. Dalam artikel the Asean Post, mengatakan bahwa pemerksaan korektif digunakan secara luas untuk menyembuhkan lesbian dari orientasi seksual. Selain itu, komunitas LGBT sebagian besar masih terpinggirkan dengan banyak diskriminasi saat mencari pekerjaan, menerima pelecehan homofobik dan transfobik. Sementara itu, pada bulan Januari 2018, Indonesia menjadi berita utama internasional setelah polisi di Aceh mencukur kepala transpuan dan memaksa mereka mengenakan pakaian pria (Ariffin 2018). Aceh merupakan daerah yang menerapkan hukum islam di Indonesia. Pada November 2020, CNN Indonesia kembali melaporkan, sepasang homoseksual dijerat dengan Qanun Jinayat 63 tentang homoseksualitas dengan ancaman 100 kali cambuk (CNN Indonesia 2020). Meskipun hukum nasional Indonesia tidak mengatur tentang pembedaan hubungan sesama jenis, namun peraturan daerah masih menerapkan persekusi terhadap kelompok LGBT.

Peminggiran dan persekusi yang dialami individu lesbian, gay, biseksual, dan transgender di tengah masyarakat dengan budaya heteronormatif yang begitu kuat, memunculkan perasaan tidak menjadi bagian dari komunitas (masyarakat)—*out group*. Eksklusi serta adanya interaksi yang terjalin antara individu LGBT kemudian membentuk identifikasi diri (*self identification*) antara *us—in group* dan *them* atau *others* sebagai musuh bersama. Supaya dapat menjelaskan pembentukan identitas kolektif komunitas LGBT, identifikasi di level individu menjadi penting untuk mengetahui nilai-nilai serta pengalaman yang dibagi bersama di dalam komunitas. Pembentukan identitas kolektif komunitas LGBT Asia menunjukkan bahwa sebuah gerakan sosial tidak hanya muncul dari ras, kelas, gender, dan bangsa. Namun, dari *common position* dalam sebuah jaringan. Polarisasi identitas antara *us* dan *them*, tidak bertumpu pada kategori yang tetap dan pasti sebagai homoseksual atau transgender. Hal ini justru ditentukan oleh posisi individu ataupun kelompok LGBT yang sama-sama berada dalam sistem yang represif. Identitas seperti ini merupakan identitas yang lebih cair dan secara tradisional lebih kuat dalam mempengaruhi perubahan sosial (Stekelenburg 2013).

Identifikasi sebagai bagian dari sebuah komunitas yang dieksklusi atas dasar identitas gender dan orientasi seksual ini tidak lagi terbatas pada kategori-kategori tradisional negara bangsa. Hal ini dipicu oleh semakin berkembangnya kosmopolitanisme yang telah mengaburkan batas-batas negara serta memperkuat keyakinan tentang nilai-nilai moral kemanusiaan, bahwa setiap manusia memiliki derajat dan martabat yang sama. Pandangan dan identitas sebagai kosmopolitan mendorong

identifikasi antara kelompok LGBT yang berada di wilayah atau negara yang berbeda untuk membangun ikatan dan solidaritas satu sama lain. Dinamika interaksi antara aktivisme LGBT lokal dan transnasional juga memungkinkan kita menjelaskan keragaman gerakan aktivis di kawasan. Aktivis LGBT tetap terkait dengan perjuangan nasional dan komitmen dalam lingkup domestik tidak lantas menghalangi para aktivis untuk terlibat di tingkat lain. Pada banyak kasus, para aktivis mampu dan tertarik untuk bermitra dalam menciptakan koalisi dengan tipe aktor yang berbeda di level yang berbeda (lokal, nasional, regional, internasional). Hal ini memungkinkan aktivis untuk bereaksi dalam berbagai konteks politik dengan penawaran yang berbeda (Caouette et al. 2014).

Namun, meskipun kosmopolitan meyakini tentang nilai-nilai kemanusiaan universal dan bekerja secara transnasional, aktivis LGBT tetap akan berorientasi pada wawasan dan konteks lokalnya (Tarrow 2005). Oleh karena itu, interaksi lintas batas membentuk identitas kolektif komunitas LGBT baru berdasar sejarah, budaya, dan agama menjadi LGBT Asia. Di Asia, konteks budaya, sejarah kolonialisme, dan agama sangat mempengaruhi struktur operasi yang dialami individu maupun kelompok LGBT. Laurent (2005) melihat Asia sebagai sebuah identitas yang menampung keberagaman yang mengacu pada sosial budaya masing-masing negara. Identitas sebagai LGBT Asia menyiratkan sebuah identitas kolektif yang lebih cair dan beragam. Pembacaan tentang Asia sebagai sebuah identitas dapat dilihat dari cara aktivis dan lembaga dalam menekankan kondisi sosial budaya yang begitu beragam.

Masing-masing negara memiliki kondisi yang berbeda meskipun dalam beberapa hal terdapat kondisi yang relatif sama. Mulai dari pengaruh agama, sikap sosial budaya, nilai-nilai tradisional keluarga hingga kondisi politik dan konstitusi negara dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap isu LGBT. Hampir setiap negara fokus isu LGBT telah ada sejak lama, meskipun isu LGBT baru muncul belakangan. Secara historis, beberapa negara memiliki tradisi penamaan sendiri untuk mengacu pada orientasi seksual dan identitas gender *non-conforming*, seperti *Babaylan* di Filipina, *Waria* dan *Bissu* di Indonesia, *đồng tính* di Vietnam, *Kathoey* di Thailand, dan *Metis* di Nepal. Di Kamboja sendiri, tidak ada kata dalam Bahasa Khmer untuk merujuk pada identitas non-heteronormatif.

Hampir setiap negara tidak memiliki aturan hukum yang secara langsung mendiskriminasi kelompok LGBT. Namun dalam praktik pemenuhan hak, kelompok LGBT masih mengalami diskriminasi di berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan dan kesehatan. Respon masyarakat terhadap keberadaan kelompok LGBT di delapan negara fokus prakarsa *Being LGBT in Asia* tidak menunjukkan adanya kekerasan langsung yang dapat

diidentifikasi secara eksplisit. Hal ini sesuai dengan apa yang ditemukan oleh Laurent dalam penelitiannya bahwa penolakan dan diskriminasi terhadap LGBT mengikuti cara yang sangat halus di negara-negara Asia. Kelompok LGBT di Asia harus menegosiasikan kebebasan, gaya hidup, dan identitas mereka dalam suasana heteroseksisme.

Kondisi ini diakibatkan oleh kuatnya pengaruh nilai-nilai tradisional keluarga (*family values*) yang masih menggambarkan sosial budaya negara di Asia. Tuntutan untuk membangun unit keluarga, menghasilkan keturunan, serta mempertahankan nilai-nilai keluarga (*family and social harmony*) mengharuskan kelompok LGBT untuk menyembunyikan identitasnya. Selain itu, agama memainkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi pandangan serta penerimaan masyarakat terhadap isu LGBT di Asia. Namun di beberapa negara seperti Nepal, Mongolia, dan Kamboja, agama relatif tidak memberikan pengaruh negatif terhadap isu LGBT. Alasan ini membuat kelompok LGBT di Asia tidak mencakup makna yang sama seperti di negara Barat.

Kondisi ini menggambarkan bahwa identitas kolektif dalam prakarsa *Being LGBT in Asia* tidak berangkat dari bahasa, simbol, ritual, dan kepercayaan yang sama. Melainkan dari konteks sosial budaya yang sangat beragam dan lebih cair. Keyakinan akan pemenuhan hak-hak LGBT sebagai bagian dari pemenuhan HAM membuat relasi yang terjalin dan identitas yang dibangun antara aktivis dan lembaga menjadi semakin solid. Prakarsa *Being LGBT in Asia* juga memungkinkan aktivis untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan identitas beserta kebutuhannya. Sebab bagi banyak orang, aktivisme adalah cara untuk membangun diri yang diinginkan. Keputusan untuk berpartisipasi tidak berfokus pada pendekatan pilihan rasional untuk politik, atau pada dorongan altruistik. Sebaliknya, konstruksi identitas merujuk pada keprihatinan, pengalaman hidup dan keinginan para aktivis agar kualitas tertentu dipakai dalam tindakan dan kehidupan bermasyarakat. Identitas kolektif menggambarkan komunitas yang dibayangkan dan juga konkret, melibatkan tindakan persepsi dan konstruksi serta penemuan ikatan, kepentingan, dan nilai-nilai yang diyakini bersama (Stekelenburg 2013).

Kesimpulan

Konstituen sebagai LGBT Asia terbentuk dalam beberapa fragmentasi pembentukan identitas. Pertama yakni identitas sebagai LGBT. Peminggiran dan persekusi yang dialami individu LGBT di tengah masyarakat dengan budaya heteronormatif yang begitu kuat, memunculkan perasaan tidak menjadi bagian dari komunitas (masyarakat). Identifikasi diri (*self identification*) seperti ini pada akhirnya membentuk polarisasi

antara *us—in group* dan *them* atau *others* sebagai musuh bersama. Kedua yaitu identitas sebagai kosmopolitan. Gerakan hak-hak LGBT tidak hanya melibatkan kelompok LGBT saja, namun juga kelompok aktivis dari berbagai negara yang ikut bersolidaritas. Hal ini didorong dengan kosmopolitanisme yang telah mengaburkan batas-batas negara serta memperkuat keyakinan tentang nilai moral kemanusiaan atas derajat dan martabat yang sama. Ketiga yaitu identitas sebagai LGBT Asia. Interaksi lintas batas yang terbangun membentuk solidaritas dan perasaan senasib diantara komunitas LGBT di Asia. Struktur operasi yang dihadapi kelompok LGBT di Asia berakar pada konteks sejarah, budaya, dan agama.

Daftar Pustaka

Buku dan Bagian dalam Buku

- Boellstorff, T., dan Danny, Y., 2000. "Indonesia". Dalam G. E. Haggerty, *Gay Histories and Cultures*. New York: Garland.
- Caouette, et al., 2014. Transnational Ideas and Connections: Understanding Asian Civil Society Activism. *Social Transformation*
- D'Emilio, J., 1983. *Sexual Politics, Sexual Communities*. Chicago: University of Chicago Press.
- Harvey, dan Wallis, J. R., 2007. *Historical Dictionary of Shamansim*. Lanham Maryland: Scarecrow Press, Inc.
- Hinsch, B., 2000. "China". Dalam R. Gulik, *Gay Histories and Cultures*. New York: Garland.
- Jackson, P. A., 2011. Queer Bangkok after the Millenium; Beyond Twentieth-Century Paradigms. In P. A. Jackson, *Queer Bangkok: Twenty-First-Century Markets, Media, and Rights*. Hong Kong: Hong Kong University Press.
- Jackson, dan Cook, N., 1999. *Gender and Sexualities in Modern Thailand*. Chiang Mai: Silkworm Books.
- Jenkins, R., 2000. *Categorization: Identity, Social Process and Epistemology*. Current Sociology.
- Keohane, R., 2002. The Globalization of Informal Violence, Theories of World Politics, and the Liberalism of Fear. *Spring*, 29-43.
- Mullen, D., 2010. Everybody Needs to Have Pride.
- Murray, A. J., 2001. Let Them Take Ecstasy: Class and Jakarta Lesbians. In G. Sullivan, & P. Jackson, *Gay and Lesbian Asia: Culture, Identity, Community*.
- Milani, C. R., & Laniado, R. N., 2007. *Transnational Social Movement and the Globalization Agenda: A Methodological Approach Based on the Analysis of the World Social Forum*. Brazilian Political Science Review.
- Offord, B., 2003. *Homosexual Rights as Human Rights: Activism in Indonesia, Singapore, and Australia*. Oxford: Peter Lang AG.

- Pham, et al., 2012. *Aspiration to Be Myself: Transgender People in VIET NAM, Realities and Legal Aspects*. Hanoi: isee.
- Sageman, M., 2004. *Understanding Terror Networks*. Philadelphia: University of Pennsylvania.
- Sen, A., 2006. *Identity and Violence: The Illusion of Destiny*. New York: W.W. Norton and Company.
- Stekelenburg, J. V., 2013. *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements*. Collective Identity.
- Tan, M. L., dan Castro, P., 2000. *In the Shadows: Men who have Sex with Men*. Quezon City: Health Action.
- Tarrow, S., 1998. *Power in Movement: Social Movement and Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tarrow, S., 2005. *The New Transnational Activism*. New York: Cambridge University Press.
- Taylor, V., dan Whittier, N. 1992. Collective Identity in Social Movement Communities: Lesbian Feminist Mobilization. In A. Morris, dan C. M. Mueller, *Frontiers in Social Movement Theory*. New Haven CT: Yale University Press.
- Thakur, P. B., dan De, S., 2016. *Social Media and Social Movement: Contemporary Online Activism in Asia*. Media Watch.
- UNDP, dan APTN, 2017. *Legal Gender Recognition: A Multi-Country Legal and Policy Review in Asia*. Bangkok: UNDP & APTN.
- UNDP, dan USAID, 2012. *Press Release: Being LGBT in Asia "UNDP and USAID to advance understanding of the social and legal environment faced by LGBT People in Asia*. Bangkok: UNDP & USAID.
- Wolf, S., 2009. *Sexuality and Socialism: History, Politics, and Theory of LGBT Liberation*. Chicago: Haymarket Books.

Paper Conference

- Boellstorff, T., 2001. Waria, National Transvestites. *3d Conference of the IASSCS*. Melbourne.

Unpublished Paper

Lee, C. K., dan Strang, D., 2003. *The International Diffusion of Public Sector Downsizing*. Unpublished Paper, Cornell University, Department of Sociology.

Annual Reports

CCHR, et al., 2013. *Statement Submission to the 18th UPR-Cambodia*.

Polletta, F., dan Jasper, J. M., 2001. *Collective Identity and Social Movements*. Annual Report Sociology.

UNDP, 1998. *Human Development Report*.

UNDP, dan USAID, 2014a. *Laporan LGBT Nasional Indonesia (Tinjauan dan Analisa Partisipatif tentang Lingkungan Hukum dan Sosial bagi Orang dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT))*. Jakarta: UNDP

UNDP & USAID, 2014b. *Being LGBT in Asia: Viet Nam Country Report*. Bangkok.

UNDP & USAID, 2014c. *Being LGBT in Asia: Mongolia Country Report*. Bangkok: UNDP & USAID.

UNDP & USAID, 2014d. *Being LGBT in Asia: China Country Report*. Bangkok: UNDP.

UNDP & USAID, 2014e. *Being LGBT in Asia: Thailand Country Report*. Bangkok: UNDP.

UNDP & USAID, 2014f. *Being LGBT in Asia: Cambodia Country Report*. Bangkok.

UNDP & USAID, 2014g. *Being LGBT in Asia: Nepal Country Report*. Bangkok.

UNDP & USAID, 2014h. *Being LGBT in Asia: The Philippines Country Report*. Bangkok.

Artikel Jurnal

Curtis, A., 2015. "From Arab Spring to Shahbag: The Role of Social Media in Terms of National Crisis", *Journal of Mass Communication and Journalism*.

- Heiman, E. M., & Cao, L. V., 1975. "Transsexualism in VIET NAM". *Archives of Sexual Behavior*, 4(1): 89-95.
- Laurent, E., 2005. "Sexuality and Human Rights: An Asian Perspective". *Journal of Homosexuality*. 163-225.
- Lee, P. H., 2016. "LGBT Rights Versus Asian Values: De/re-constructing the Universality of Human Rights". *The International Journal of Human Rights* .
- Leyson, J. F., 2001. "International Encyclopedia of Sexuality". *Continuum*, 4.

Artikel Daring

- Ariffin, E., 2018. "ASEAN's shifting attitudes towards LGBT rights", [Daring]. Tersedia dalam <https://theaseanpost.com/article/aseans-shifting-attitudes-towards-lgbt-rights> [Diakses (02 Januari 2022)]
- Amalia, S., 2019. "Perjuangan Hak-Hak LGBT di Dunia", [Daring]. Tersedia dalam <https://magdalene.co/tag/sejarah-lgbt> [Diakses (21 Februari 2022)]
- Ariffin, E., 2018. "ASEAN's shifting attitudes towards LGBT rights", [Daring]. Tersedia dalam <https://theaseanpost.com/article/aseans-shifting-attitudes-towards-lgbt-rights> [Diakses (15 Januari 2022)]
- Beyond Blue, 2018. "The Impact of Discrimination", [Daring]. Tersedia dalam <https://www.beyondblue.org.au/who-does-it-affect/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-lgbti-people/the-impact-of-discrimination> [Diakses (05 Maret 2022)]
- Cameron, D., & Johnson, R., 2015. "How Gay Rights Have Spread Around the World over the Last 224 Years", [Daring]. Tersedia dalam <https://www.washingtonpost.com/graphics/world/gay-rights-history/> [Diakses (14 Januari 2022)]
- CNN Indonesia, 2020. "Pasangan LGBT Digrebek Warga Aceh, Terancam 100 Kali Cambuk", [Daring]. Tersedia dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201114152026-12-569773/pasangan-lgbt-digrebek-warga-aceh-terancam-100-kali-cambuk> [Diakses (24 Maret 2022)]
- Gevisser, M., 2020. "How globalisation has transformed the fight for LGBTQ+ rights", [Daring]. Tersedia dalam

<https://www.theguardian.com/world/2020/jun/16/how-globalisation-has-transformed-the-fight-for-lgbtq-rights> [Diakses (06 Februari 2022)]

Government of Nepal, dan Social Welfare Council, 2020. “NGOs Affiliated with Social Welfare Council”, [Daring]. Tersedia dalam http://www.swc.org.np/SWC_NGOs_Total.pdf [Diakses (09 Maret 2022)]

Hastanto, I., 2020. “Transpuan Dibakar Hidup-hidup di Jakarta Utara Usai Dituduh Mencuri”, [Daring]. Tersedia dalam <https://www.vice.com/id/article/wxe99q/transpuan-dibakar-hidup-hidup-di-jakarta-utara-usai-dituduh-mencuri> [Diakses (18 Januari 2022)]

Info Cubic, 2020. “Social Media Marketing Trends in Asia”, [Daring]. Tersedia dalam <https://www.infocubic.co.jp/en/blog/asia/social-media-marketing-trends-asia/> [Diakses (09 Maret 2022)]

Oetomo, D., 1996. “Gay Identities”, [Daring]. Tersedia dalam <http://insideindonesia.org/edit46/dede.htm> [Diakses (27 Februari 2022)]

Pew Research Center, 2014. “The Global Divide on Homosexuality: Greater Acceptance in More Secular and Affluent Countries”, [Daring]. Tersedia dalam <https://www.pewresearch.org/global/2013/06/04/the-global-divide-on-homosexuality/> [Diakses (02 April 2022)]

UNDP, 2015. “Sweden, USAID and UNDP renew support for LGBT rights in Asia”, [Daring]. Tersedia dalam <https://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/presscenter/pressreleases/2015/02/24/sweden-usaid-and-undp-renew-support-for-lgbt-rights-in-asia/> [Diakses (08 April 2022)]

UNDP, 2020. “Being LGBT in Asia and the Pasific”, [Daring]. Tersedia dalam <https://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/programmes-and-initiatives/being-lgbt-in-asia.html> [Diakses (14 Januari 2022)]

USAID, 2020. “Being LGBT in Asia”, [Daring]. Tersedia dalam <https://www.usaid.gov/asia-regional/being-lgbt-asia> [Diakses (17 Januari 2022)]

Wong, B., 2020. “Homophobia Is Not an Asian Value. It’s Time for the East to Reconnect to Its Own Traditions of Tolerance”, [Daring]. Tersedia dalam <https://time.com/5918808/homophobia-homosexuality-lgbt-asian-values/> [Diakses (04 Maret 2022)]